

LITERASI KOMUNIKASI POLITIK NONVERBAL CALON PILKADA JAWA BARAT BAGI SISWA SMA NEGERI JATINANGOR

Andika Vinianto Adiputra, Abie Besman, Sandi Jaya Saputra

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

E-mail: andikavinianto@yahoo.com

ABSTRAK,

Kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam bidang politik, khususnya dalam konteks komunikasi politik merupakan unsur yang mempengaruhi berlangsungnya sebuah budaya politik yang baik bagi masyarakat. Namun kesadaran tersebut tidak hadir begitu saja, tetapi terdapat proses-proses yang harus ditempuh, terutama bagi remaja sebagai pemilih pemula yang berpotensi besar dalam menentukan hasil pemilu. Salah satu faktor yang dapat menumbuhkan kesadaran ialah pemberian sosialisasi politik, terkait dengan gestur sebagai bagian dari wacana politik. Melalui gestur, para politisi ingin menegaskan, memperkuat dan meyakinkan konstituennya tentang pesan, ideologi, dan makna yang disampaikan. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul “Literasi Komunikasi Politik Non Verbal dalam Pesta Demokrasi di Indonesia”, siswa-siswi SMAN Jatinangor, diberikan pembekalan wawasan terkait komunikasi politik secara teoritis serta pemahaman mengenai permasalahan dan fenomena komunikasi politik non verbal para politisi khususnya kandidat di Jawa Barat, yang diwakili oleh empat wilayah utama di Jawa Barat, yaitu Wilayah Megapolitan (Kabupaten Bogor), Priangan Barat (Kota Sukabumi), Pantura (Kabupaten Purwakarta) dan Cirebon Raya (Kota Cirebon). Fokus pelatihan adalah pada pemahaman makna mengenai gestur tubuh, berbagai bentuk tanda verbal (bahasa) kode budaya visual, serta merujuk pada desain teks komunikasi visual. Wawasan yang diberikan diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor mengenai komunikasi politik secara umum serta membentuk pola pikir yang kritis dan analitis dalam memaknai pesan-pesan non-verbal calon kepala daerah.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Pilkada Jawa Barat, Literasi Komunikasi Non Verbal

ABSTRACT,

Community awareness and knowledge in the field of politics, especially in the context of political communication is an element that influences the ongoing political culture that is beneficial for society. However, this awareness does not appear in an instant, but there are processes that must be taken, especially for teenagers as beginner voters who have great potential in determining election results. One factor that can foster awareness is the provision of political socialization, related to gesture as part of political discourse. Through gestures, politicians emphasize, strengthen and convince their constituents about the message, ideology, and meaning conveyed. In our community service activity entitled “Literacy of Non Verbal Political Communication Surrounding the Democracy Feast in Indonesia”, students of SMAN Jatinangor, were given classes related to theoretical political communication and understanding of the problems and phenomena of non-verbal political communication, especially candidates in West Java, which is represented by four main regions in West Java, namely the Megapolitan Region (Bogor Regency), West Priangan (Sukabumi), Pantura (Purwakarta Regency) and Cirebon Raya (Cirebon). The focus of these classes is on understanding the meaning of body gestures, various forms of verbal signs (language) codes of visual culture, and referring to the design of visual communication texts. The insight given is expected to increase the knowledge of students of SMAN Jatinangor regarding political communication in general and to form critical and analytical mindset in interpreting non-verbal messages of political election candidates.

Key words: Political Communication, West Java Election, Non Verbal Communication Literacy

PENDAHULUAN

Persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2018 terbilang cukup ketat dan lebih besar dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU, Pilkada tahun ini diikuti oleh 171 daerah yang berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah tersebut, terdapat 17 di tingkat provinsi, 39 tingkat kota dan 115 tingkat kabupaten. Untuk kandidat yang berpartisipasi sebanyak 58 pasang di tingkat provinsi, 373 pasang di tingkat kabupaten dan 139 pasang untuk tingkat kota. Pelaksanaan pemilu seringkali menghadirkan berbagai macam *issue* yang menarik serta polemik yang diakibatkan oleh para calon kepala daerah. Dengan dukungan media sosial, hal tersebut telah mendorong animo yang tinggi terhadap polarisasi dukungan di arus bawah kepada para calon dan memuncak pada masa kampanye.

Dalam situasi kampanye, para kandidat memiliki strategi komunikasi dalam menyampaikan pesan. Salah satunya adalah dengan sering melakukan gestur politik. Melalui gestur politik, seorang politisi bisa lebih menegaskan sikap politis dan ideologi yang dipegangnya. Gestur mereka memperkuat dan meyakinkan khalayak tentang pesan, ideologi, dan makna yang disampaikan. Bahkan, seorang tersangka kasus korupsi pun sering menggunakan gestur demi meyakinkan khalayak bahwa ia tak bersalah. Gestur, mempertegas apa yang tak dapat ditegaskan melalui ucapan, meyakinkan kita tentang apa yang tak dapat diyakinkan melalui bahasa. Karena itu, menurutnya, gestur bersifat “yang etis” sekaligus “yang politis” (Amir Piliang, Yasraf, 2012).

Dalam dunia politik di era media baru, fungsi gestur politik telah beralih: dari memperkuat bahasa politik menjadi kekuatan politik itu sendiri. Gestur politik kini tak memperkuat makna dan pesan politik, lanjut Piliang,

tetapi mendistorsinya, dengan menampakkan dirinya lebih esensial ketimbang ide, makna, dan ideologi politik itu sendiri. Inilah gesturisasi politik, yang melencengkan gestur sebagai penguat wacana politik menjadi bagian substansialnya.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Meadow (Cangara, 2016) mengacu kepada segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik. Komunikasi tak semata-mata secara verbal saja tetapi juga bisa disampaikan secara non verbal, salah satu dimensi dari komunikasi politik adalah komunikasi sebagai simbolik. Komunikasi sebagai simbolik berarti hampir setiap pernyataan manusia baik yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri atau kepentingan orang lain dinyakan dalam bentuk simbol. Faktanya hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam proses komunikasi banyak dipengaruhi oleh simbol atau lambang-lambang yang digunakan dalam berkomunikasi, serta hal ini juga menunjukkan tingginya kualitas budaya manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya.

Komunikasi politik adalah komponen utama dalam sebuah proses politik. Komunikasi politik bisa dibilang merupakan alat penyambung dan mediator dari seluruh proses politik. Seluruh lembaga politik bisa dipastikan menggunakan komunikasi politik, seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, maupun warga yang kerap melakukan proses komunikasi politik. Komunikasi politik menggunakan keilmuan dari ilmu komunikasi, istilah-istilah komunikasi seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek digunakan juga oleh komunikasi politik. Perbedaan utama komunikasi politik terletak dari konten yang disampaikan, yang lebih mengkhususkan diri dalam penyampaian informasi politik.

R.M. Perloff (1998) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dengan mana pemimpin, media, dan warganegara suatu bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Secara operasional, komunikasi politik juga dapat dinyatakan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu hingga memberikan efek (*feedback*).

Komunikasi Nonverbal

Dalam proses komunikasi, tukar-menukar pesan selalu menggunakan lambang-lambang verbal dan nonverbal. Terkadang lambang-lambang itu digunakan secara bersama-sama dengan Bahasa verbal. Namun, tak jarang pula masing-masing berdiri sendiri. Meski manusia secara lahiriah lebih cenderung mencoba dan mengeksplorasi penggunaan komunikasi verbal, lewat bahasa atau lisan, ternyata dalam beberapa kesempatan, komunikasi verbal ini memiliki kelemahan, terutama pada keterbatasan bahasa itu sendiri.

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, bukan melalui kata-kata (Mulyana, 2010). Dalam komunikasi, seorang penyampai pesan atau komunikator tidak hanya menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga secara nonverbal. Pesan-pesan nonverbal bersifat tidak hanya memperkuat pesan verbal, namun terkadang menggantikan dan bahkan menyampaikan pesan tersendiri. Keterampilan untuk menafsirkan dan memahami pesan-pesan nonverbal tersebut bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penerima pesan atau komunikan. Mimik wajah, gerak tangan, atau sentuhan merupakan bahasa tubuh yang kerap menjadi penelitian dalam ranah komunikasi nonverbal.

Dalam kehidupan nyata komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan (Hardjana, 2003).

Dalam komunikasi, perilaku nonverbal saling terkait dengan pesan-pesan verbal yang menyertainya. Dengan kata lain, komunikasi nonverbal juga tak terpisahkan dengan pesan verbal. Namun, persoalannya akan menjadi lain jika tidak terjadi kesesuaian atau bertentangan antara pesan-pesan verbal dengan gerak-gerik nonverbalnya. Di sini, pesan komunikasi akan bermakna rangkap, dan si penerima pesan akan lebih percaya pada sikap nonverbalnya ketimbang tutur katanya. Contohnya, orang berkata senang berjumpa dengan temannya sambil menghindarkan tatapan muka dengan teman atau lawan bicaranya. Temannya akan mudah menangkap ketidakjujuran dari apa yang dikatakannya. Pada dasarnya, pesan nonverbal didorong oleh hal-hal tertentu.

Gestur Politik

Gestur adalah tindakan khusus yang bersifat membawa, menjaga, dan mendukung bahasa, ungkap Yasraf Amir Piliang dalam *Kompas* 5 Desember 2012. Gestur berada di antara “cara” (*means*) dan “tujuan” (*ends*), tetapi ia sendiri bukan tujuan. Melalui gestur, pesan dan makna diperkuat, tetapi ia sendiri bukan makna. Ia berfungsi menampakkan sesuatu sebagai “pengantaraan” (*mediality*), yaitu menengahi. Gestur memungkinkan terjadinya ekspresi bahasa verbal, tetapi ia sendiri bukan ekspresi bahasa verbal. Gestur, lanjut Piliang, merupakan pusat dari multimodal dalam konteks bahasa komunikasi dan wacana politik: ucapan, tulisan, sentuhan, dan benda-benda—yang masing-masing memiliki fungsi semiotik, tetapi secara bersama-sama membangun komunikasi yang bermakna.

Fungsi gestur sendiri adalah untuk memperkuat ekspresi, tekanan, dan kekuatan bahasa komunikatif verbal sehingga dapat melipatgandakan efek komunikasi. Gestur politik diperlukan ketika para politisi berada dalam situasi pertarungan bahasa, yang mengharuskan mereka

terlibat dalam permainan bahasa. Melalui gestur, para politisi mempertegas pandangan dan sikap ideologisnya. Oleh karena itu, pernyataan “penumpang gelap”, “mafia narkoba”, atau “para pemeran” dari seorang politisi sekaligus menempatkan dirinya secara ideologis di dalam sebuah “posisi ideologi” tertentu sebagai kebalikannya. Dengan kata lain, politisi bersangkutan secara tak langsung menegaskan dirinya sebagai “penumpang resmi”, “antimafia”, atau “anti-pemerasan”.

Melalui gestur politik, seorang politisi bisa lebih menegaskan sikap politis dan ideologi yang dipegangnya. Gestur mereka memperkuat dan meyakinkan khalayak tentang pesan, ideologi, dan makna yang disampaikan. Bahkan, seorang tersangka kasus korupsi pun sering menggunakan gestur demi meyakinkan khalayak bahwa ia tak bersalah. Gestur, mempertegas apa yang tak dapat ditegaskan melalui ucapan, meyakinkan kita tentang apa yang tak dapat diyakinkan melalui bahasa. Karena itu, menurutnya, gestur bersifat “yang etis” sekaligus “yang politis”.

Politik tidak dapat dilepaskan dari gestur karena di dalam politik ada fungsi komunikasi untuk meyakinkan khalayak. Setiap potensi tubuh dikerahkan untuk menegaskan pesan, ideologi, makna, dan nilai-nilai politik. Melalui gestur politik, para politisi mengarahkan segala potensi tanda tubuh—mata, mulut, tangan, jari—sebagai bagian “multimodal” untuk memperkuat pesan dan makna politik. Politik sendiri, tulis Piliang, adalah sebuah gestur dan cara murni, yaitu praksis yang memungkinkan ideologi politik dimanifestasikan. Politik adalah “penggesturan” (*gesturality*) manusia politik.

Berbagai bentuk perilaku non verbal seperti gerak, mimik wajah, gerakan tubuh, gerak otot tubuh, berkeringat, muka merah, sikap diam, atau gelisah, nada dan volume suara, kerlingan mata, kerut dahi, menarik nafas, dan sebagainya itu terjadi sebagai bentuk perilaku yang normal. Seluruh bagian tubuh secara normal bekerja sama sama mengkomunikasikan makna tertentu.

Gestur tangan manusia merupakan salah satu media alami manusia dalam berkomunikasi. Seringkali, penerapannya dalam interaksi manusia bisa memberikan keleluasaan dan mempunyai persepsi yang berbeda. Komunikasi non verbal ini terjadi dalam suatu konteks (situasi, lingkungan) dan makna yang diberikan oleh suatu perilaku non verbal juga tergantung pada pesan verbal yang menyertainya. Misalnya, ketika seseorang tengah menyampaikan pendapatnya dalam sebuah perdebatan maka sering kali tangannya mengepal atau mengacung – acungkan jari untuk penekanan dan repetisi pesan.

Menurut Wood (2009), komunikasi non verbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda (*sign*), tindakan/perbuatan (*action*) atau objek (*object*).

a. Bahasa Tubuh. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan,, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan sikap orang.

- b. Tanda. Dalam komunikasi nonverbal tanda mengganti kata-kata, misalnya, bendera, rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara; aba-aba dalam olahraga.
- c. Tindakan/perbuatan. Ini sebenarnya tidak khusus dimaksudkan mengganti kata-kata, tetapi dapat menghantarkan makna. Misalnya, menggebrak meja dalam pembicaraan, menutup pintu keras-keras pada waktu meninggalkan rumah, menekan gas mobil kuat-kuat. Semua itu mengandung makna tersendiri.
- d. Objek. Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata, tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. Misalnya, pakaian, aksesoris dandan, rumah, perabot rumah, harta benda, kendaraan, hadiah

Pemilih Pemula

Menurut informasi yang diperoleh dari website KPU, pemilih pemula adalah remaja yang berusia 17-21 atau yang sudah menikah atau mereka yang baru pertama kali memiliki pengalaman memilih, yang pada pilkada periode yang lalu belum genap berusia 17 tahun. Peran remaja sebagai pemilih pemula memiliki potensi besar dalam menentukan hasil dari sebuah pemilu. Sebagai generasi Z yang tidak asing dengan penggunaan media internet, media sosial dimanfaatkan untuk mencari dan menyebarkan informasi, serta mempengaruhi khalayak luas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu. Berdasarkan pra-riset yang telah dilakukan sebelumnya, minimnya ketertarikan remaja terhadap dunia politik menjadi permasalahan yang utama. Disamping itu, pengetahuan mengenai politik Indonesia sangat terbatas. Sementara bagi remaja yang relatif lebih tertarik, terdapat kecenderungan bagaimana cara melihat dan memaknai pesan yang disampaikan para kandidat pemilu secara naif dan hanya melihat dari satu sisi.

Dengan demikian, maka tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi politik siswa SMAN Jatinangor terkait komunikasi politik non verbal dalam pesta demokrasi di Indonesia, untuk mengetahui makna dan pesan yang tersirat melalui komunikasi politik non verbal dalam pesta demokrasi di Indonesia, serta untuk melakukan sosialisasi kepada siswa SMAN Jatinangor dan mahasiswa Universitas Padjadjaran terkait komunikasi politik non verbal dalam pesta demokrasi di Indonesia.

METODE

Dalam mewujudkan upaya yang telah dipaparkan diatas maka kegiatan PKM ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- Lokakarya, metode ini dilakukan di ruang kelas dengan memberikan presentasi materi mengenai komunikasi non verbal yang ditunjukkan oleh beberapa aktor politik di Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan berlangsung

secara dua arah, dimana terlebih dahulu pemateri memberikan materi mengenai komunikasi non verbal dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh siswa SMAN Jatinangor.

- *Focus Group Discussion*, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menghimpun ide serta pendapat siswa-siswi terkait dengan persiapan konten dan dekorasi stand komunikasi politik pada kegiatan Festival Budaya.
- *Praktik/Latihan*, metode ini digunakan untuk menguji seberapa besar siswa SMAN Jatinangor telah memahami materi literasi politik non verbal saat pesta demokrasi di Indonesia dan sebagai tahap awal untuk menjadi komunikator bagi masyarakat sekitarnya mengenai literasi komunikasi politik non verbal. Praktik berlangsung di kegiatan Festival Budaya yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai literasi komunikasi politik non verbal dalam pesta demokrasi di Indonesia. Sosialisasi dilakukan kepada siswa SMAN Jatinangor mengenai literasi bentuk pesan-pesan non verbal yang dibawa pada setiap aktor politik yang ada di Indonesia. Mulai dari lingkup Jawa Barat hingga pada taraf nasional. Beberapa materi yang diberikan pada sosialisasi ini mengenai atribut kampanye yang digunakan oleh tiap aktor politik, gaya berpakaian aktor politik di Indonesia, dan selanjutnya ditafsirkan mengenai maksud yang ingin disampaikan oleh para aktor politik tersebut.

Selain itu sosialisasi juga menyampaikan perbedaan gaya berkomunikasi khususnya dalam komunikasi non verbal yang dibawa oleh setiap aktor politik untuk mencapai setiap khalayak sasarannya. Seperti contohnya komunikasi non verbal yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil pada saat berkampanye untuk menjadi walikota Bandung dengan saat berkampanye untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Selain itu sosialisasi juga menyampaikan bagaimana gaya berpakaian yang ditunjukkan oleh Prabowo dan Jokowi. Sosialisasi juga menyampaikan mengenai makna warna yang dibawa oleh setiap aktor politik, seperti warna putih yang menandakan kesucian dari berbagai tindakan kotor (salah satunya korupsi), warna merah, warna hijau, dan lain-lain yang juga bisa dikaitkan dengan atribut warna partai pendukung. Urgensi dalam melakukan sosialisasi ini adalah merupakan bekal awal yang diberikan untuk siswa SMAN Jatinangor yang pada program selanjutnya diharapkan untuk bisa memberikan informasi kepada target sasaran. Kedua sosialisasi ini dilakukan agar selanjutnya siswa SMAN Jatinangor menjadi komunikator bagi masyarakat yang ada disekitarnya untuk bisa memberikan literasi dan informasi mengenai pesan-pesan non verbal yang disampaikan oleh siswa SMAN Jatinangor.

Kegiatan kedua merupakan kegiatan puncak dari rangkaian KKN yang dilakukan oleh kelompok kami dengan membuat stand politik pada saat pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam kegiatan Festival Budaya terdapat berbagai macam budaya dari berbagai macam negara yang menampilkan standnya dalam bentuk kebudayaan yang ada di seluruh dunia. Sedangkan kelompok kami mengambil tema budaya politik di Indonesia sebagai tema utama. Dalam kegiatan Festival Budaya siswa-siswi SMAN Jatinangor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi sebelumnya dan mendapatkan literasi mengenai politik non verbal berperan sebagai komunikator dalam stand budaya politik Festival Budaya.

Stand diisi dengan berbagai macam atribut dan foto setiap pasangan calon gubernur Jawa Barat dan berbagai bentuk komunikasi non verbal dari beberapa aktor politik di Indonesia. Seperti pakaian yang digunakan oleh setiap pasangan calon dan warna-warna yang menonjol yang digunakan oleh setiap pasangan calon. Siswa-siswi SMAN Jatinangor memiliki tugas sebagai komunikator pada stand tersebut dan bertugas untuk menjelaskan setiap materi yang telah disiapkan di dalam stand dengan materi yang sebelumnya telah diajarkan saat sosialisasi.

Urgensi dari program ini adalah sebagai tolak ukur seberapa besar siswa SMAN Jatinangor telah memahami materi literasi politik non verbal saat pesta demokrasi di Indonesia dan sebagai tahap awal untuk menjadi komunikator bagi masyarakat sekitarnya mengenai literasi komunikasi politik non verbal.

Dalam proses pengumpulan data serta survey pada siswa-siswi SMAN 1 Jatinangor, diketahui bahwasanya mayoritas siswa-siswi SMAN 1 Jatinangor cenderung kurang memahami makna komunikasi politik itu sendiri secara baik dan mendalam. Hal ini antaralain disebabkan oleh kecenderungan generasi muda untuk apatis terhadap perkembangan politik secara umum di Indonesia. Gejala apatisisme ini dikarenakan merajalelanya isu korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak terkendali dan mempengaruhi citra Partai Politik, baik Politikus secara perseorangan serta tidak terkecuali Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Sehingga terdapat suatu kekurangan pemahaman mengenai unsur-unsur dalam politik itu sendiri, seperti dalam konteks komunikasi politik.

Generasi muda, dalam hal ini siswa-siswi SMAN 1 Jatinangor berdasarkan survey yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya kurang memahami hakikat atau konteks adanya suatu komunikasi politik personal branding dan anomali politik dalam suatu kampanye politik. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi SMAN 1 Jatinangor akan komunikasi politik itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya komunikasi politik yang hendak dikaji ialah komunikasi politik non-verbal, seperti cara berpakaian, gerak-gerik dalam menggunakan Bahasa tubuh serta lain sebagainya. Bahwa dalam hal

tersebut, terdapat suatu komunikasi politik berisi tentang visi misi atau pesan politik tertentu. Pesan politik ini ialah isu-isu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Diyakini bahwa komunikator politik selalu “merekayasa” pesan politik sebelum itu disampaikan kepada komunikan, dimana terdapat makna-makna tersirat yang ingin disampaikan oleh komunikator.

Contohnya saja saat dijelaskan makna atas penggunaan kemeja kotak-kotak oleh Jokowi. Dimana dalam penggunaan kemeja kotak-kotak oleh Jokowi pada saat kampanye memiliki suatu komunikasi politik tertentu, yang ingin menunjukkan suatu keseragaman suku, etnis, warna dan daerah. Ataupun gestur Ridwan Kamil berupa mengangkat jempol bersama-sama mengisyaratkan apa yang Ridwan Kamil bawa merupakan apa yang disetujui oleh masyarakat. Sisw-siswi SMAN 1 Jatinangor cenderung belum dapat memahami atau bahkan tidak mengetahui adanya suatu pesan politik dalam hal-hal tersebut.

Atas dasar itu, maka kemudian dijadikan suatu tolak ukur dalam kegiatan PKM untuk melakukan sosialisasi atas Komunikasi Politik. Hal ini tidak lain juga berkaitan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018. Agar siswa-siswi SMAN 1 Jatinangor dapat memahami dengan baik serta dapat melakukan analisa atas komunikasi politik yang diberikan oleh komunikator, serta agar tidak terjadi kesalahpahaman makna dalam proses pelaksanaan komunikasi tersebut.

SIMPULAN

Rangkaian kegiatan PKM secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan alur tahapan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan pelaksanaan program “Literasi Komunikasi Politik Non Verbal dalam pesta Demokrasi di Indonesia” yang dikhususkan pada pelaksanaan pemilihan Gubernur di Jawa Barat sudah melalui tahapan yang tepat, meskipun ada beberapa perubahan jadwal dari pihak SMA Negeri Jatinangor. Pelaksanaan program literasi politik di SMA Negeri Jatinangor ini walaupun masih banyak kekurangan namun ada hasil yang didapat yaitu meningkatnya pengetahuan siswa-siswi mengenai komunikasi politik non verbal khususnya dalam mengamati gestur dan pakaian para calon kandidat Gubernur Jawa Barat tahun 2018 sehingga para siswa-siswi dapat menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu juga partisipasi dan antusiasme dari siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor memiliki feedback yang baik. Sehubungan dengan masih minimnya pengetahuan dan peminatan siswa-siswi tingkat SMA mengenai komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi non verbal yang digunakan para politisi untuk memperkuat pesannya, maka kegiatan PKM yang bertemakan politik

harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada sekolah-sekolah lain. Posisi siswa-siswa SMA pada pemilihan kepala daerah adalah sebagai pemilih pemula. Oleh karena itu, materi pelatihan bukan hanya terfokus secara teoretis, namun juga mendalami permasalahan dan fenomena komunikasi politik non verbal dalam pesta demokrasi di Indonesia, agar nantinya mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan materi tersebut kepada objek sasaran yang ingin diteliti, serta menjadikan pengetahuan tersebut sebagai pertimbangan dalam memilih kepala daerah.

Komunikasi non verbal yang diperlihatkan para politisi dalam bentuk gestur dan simbol merupakan bagian dari budaya yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Maka selebrasi budaya dalam bentuk Festival Budaya yang diselenggarakan setiap tahun oleh Fakultas Ilmu Komunikasi harus melibatkan para siswa-siswi SMA, dimana pengetahuan komunikasi politik yang telah diperolehnya dapat disebarluaskan melalui kegiatan tersebut. Keterlibatan mahasiswa dalam hal ini menjadi sangat penting dikarenakan jumlah siswa-siswi yang relatif banyak dapat dengan mudah diakomodir kebutuhannya oleh mahasiswa. Untuk rencana jangka panjang, peneliti berharap bahwa kegiatan seperti ini dapat juga dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatan Festival Budaya dapat dirasakan oleh semua siswa dan guru sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2016). Sejarah Pemilu di Indonesia. Diambil 9 Juli 2018, dari <http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/>
- Amir Piliang, Yasraf (2012) *Semiotika dan Hipersemiotika; kode, gaya dan matinya makna*, Bandung, Matahari
- Cangara, Hafiez. (2016). *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi* (Edisi Revi). Depok: PT Raja grafindo Persada.
- Hardjana, AM. (2003) *Komunikasi Intrapersonal & Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyana, Deddy. (2010). *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M.Q (1980). *Qualitative Evaluation Method*, Beverly Hills, London: Sage Publication.
- Perloff. R.M. (1998). *Political Communication: Politics, Press, and Public in America*. New Jersey and London: Lawrence Erlbaum.
- Wood. Julia T. (2009). *Communication in Our Lives*. Wadsworth. Boston: Cengage Learning